

ANALISA PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA

Anastasya Rizki Strivany

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya

Email : anstsy13@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. SAKD merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan studi dokumentasi terhadap pihak terkait di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAKD di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, namun masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan keterlambatan dalam pemutakhiran teknologi informasi. Faktor-faktor seperti komitmen manajemen, pelatihan berkelanjutan, dan dukungan teknologi yang memadai ditemukan memiliki peran penting dalam efektivitas penerapan SAKD. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun penerapan SAKD di Kota Surabaya relatif baik, perbaikan lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Surabaya, Penerapan, Kualitatif Deskriptif.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Regional Financial Accounting System (SAKD) at the Regional Revenue Agency of Surabaya City. SAKD is a critical tool in managing local government finances, designed to enhance transparency, accountability, and efficiency. The research uses a descriptive qualitative method, employing data collection techniques such as observations, and document studies involving employees and related parties at the Regional Revenue Agency of Surabaya City. The results indicate that the implementation of SAKD at the Regional Revenue Agency of Surabaya City has generally followed established standards but faces several challenges, such as limited human resources and delays in updating information technology. Factors such as management commitment, continuous training, and adequate technological support play crucial roles in the effectiveness of SAKD implementation. The study concludes that while the implementation of SAKD in Surabaya City is relatively good, further improvements are needed to address these challenges and enhance the performance of local financial management.

Keywords: Regional Financial Accounting System, Regional Revenue Agency, Surabaya, Implementation, Descriptive Qualitative.

Article History

Received: September 2024

Reviewed: September 2024

Published: September 2024

Plagirism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : Musytari**

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-Noncommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang berfungsi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan dana publik. SKD dirancang untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan daerah dicatat, dilaporkan, dan diaudit secara tepat sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Di Indonesia, penerapan SKD telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah dan mendorong pertanggungjawaban publik atas penggunaan anggaran daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya merupakan salah satu lembaga pemerintah daerah yang berperan penting dalam mengelola pendapatan daerah, termasuk pajak dan retribusi. Dalam konteks tersebut, penerapan SKD menjadi krusial untuk memastikan bahwa pendapatan daerah dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, berbagai tantangan kerap muncul dalam implementasi SKD, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, keterbatasan teknologi informasi, serta kompleksitas prosedur administrasi. Tantangan ini dapat menghambat efektivitas penerapan SKD dan berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan daerah secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SKD pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya, dengan fokus pada bagaimana sistem ini diterapkan, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi aktual penerapan SKD di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya serta mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas penerapan SKD, tidak hanya di Kota Surabaya tetapi juga di berbagai daerah lainnya di Indonesia, sehingga dapat mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Metode kualitatif deskriptif dipilih karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam dalam konteks yang spesifik, serta memahami kompleksitas penerapan SKD dari perspektif pihak-pihak yang terlibat langsung di dalamnya.

1. Desain Penelitian

Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan bagaimana SKD diterapkan di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya. Pendekatan ini tidak hanya mengungkapkan gambaran yang ada, tetapi juga menggali alasan di balik penerapan tersebut, serta tantangan dan kendala yang dihadapi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

- Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan prosedur akuntansi keuangan di Badan Pendapatan Daerah, untuk memahami konteks kerja, proses, dan interaksi yang terjadi selama penerapan SKD. Observasi ini memberikan data empiris yang dapat digunakan untuk memperkuat temuan dari wawancara.

- Studi Dokumentasi

Pengumpulan data juga dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait, seperti laporan keuangan, kebijakan internal, pedoman pelaksanaan SAKD, dan regulasi yang berlaku. Studi dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan SAKD secara formal dan bagaimana implementasinya diatur oleh lembaga tersebut.

3. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Proses analisis dimulai dengan mengorganisasikan data, mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari hasil observasi, dan studi dokumentasi. Data kemudian diinterpretasikan untuk menemukan pola, hubungan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SAKD. Seluruh hasil analisis data ini akan digunakan untuk memberikan gambaran deskriptif mengenai kondisi penerapan SAKD di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) mencakup beberapa konsep penting, yaitu definisi, tujuan, fungsi, dan komponen. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing konsep tersebut

a. Definisi

SAKD adalah implementasi dari perancangan kegiatan akuntansi yang meliputi proses merangkum kegiatan transaksi atau aktivitas keuangan dan pengendalian laporan keuangan demi berjalannya kemajuan dalam membuat anggaran pendapatan belanja daerah.

SAKD juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan subsistem yang didalam setiap prosedur, perangkat, dan peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi berbagai laporan untuk pihak luar maupun internal pemerintah daerah.

b. Tujuan

Tujuan utama SAKD adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan sumber-sumber keuangan secara akuntabel dan transparan.

Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai informasi yang akurat dalam pengambilan keputusan ekonomi.

c. Fungsi

Fungsi utama SAKD adalah menghasilkan informasi keuangan yang memudahkan pengelolaan keuangan daerah. Informasi ini digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban¹.

Fungsi lainnya meliputi pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi.

d. Komponen

Komponen utama SAKD meliputi:

- Prosedur akuntansi penerimaan kas: Pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006).

¹ Desipradani and Rusmawati, "PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMKOT SURABAYA DALAM PENERAPAN PP NO. 71 TAHUN 2010."

- Prosedur akuntansi pengeluaran kas: Pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006).

- Standar akuntansi pemerintahan: Standar yang digunakan untuk mengatur proses akuntansi keuangan daerah, seperti PP No. 24 tahun 2004 dan PP No. 71 tahun 2010 (PP No. 24 tahun 2004)

Dengan demikian, SAKD merupakan sistem yang komprehensif yang mengatur proses akuntansi keuangan daerah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan.

Penerapan SAKD di Pemerintahan Daerah

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) di pemerintahan daerah memiliki beberapa tujuan dan komponen penting. SAKD bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber-sumber keuangan secara akuntabel dan transparan²

SAKD juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang akurat dan transparan membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi yang lebih baik³

Penerapan SAKD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (PP No. 24 tahun 2004) yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah. Pengendalian internal yang efektif merupakan komponen penting dalam SAKD. Hal ini memastikan bahwa proses akuntansi dan pelaporan keuangan berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan⁴. Kompetensi sumber daya manusia juga sangat penting dalam penerapan SAKD. Pegawai yang memiliki kompetensi yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Pengumpulan data yang akurat dan lengkap merupakan langkah awal dalam penerapan SAKD. Data ini kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang transparan⁵. Pemerintah daerah harus terus mengembangkan standar akuntansi yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan-undangan dan kondisi daerah

Dengan demikian, penerapan SAKD di pemerintahan daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas laporan keuangan, serta memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan efektif dan efisien.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan proses yang kompleks dan penting dalam pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah (PKD) adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan sumber daya keuangan yang digunakan oleh pemerintah daerah. PKD bertujuan untuk memastikan bahwa keuangan daerah digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan daerah[1][2].

Pentingnya pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

a) Transparansi dan Akuntabilitas

PKD meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya keuangan daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan secara akuntabel dan transparan⁶

b) Kualitas Laporan Keuangan

² Rampengan, Morasa, and Pusung, "ANALISIS LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BITUNG."

³ Riharjo and Ardini, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Akrua Atas Barang Milik Pemerintah Daerah Kota Surabaya."

⁴ Watopa, "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi."

⁵ Indrayani and Widiastuti, "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten)."

⁶ Mentu and Sondakh, "PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NO.71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN DINAS SOSIAL PROV. SULUT."

PKD memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan adalah akurat dan relevan. Laporan ini digunakan sebagai informasi yang penting dalam pengambilan keputusan ekonomi dan pembangunan daerah⁷

c) Pengambilan Keputusan

Informasi keuangan yang akurat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Pemerintah daerah dapat memprediksi kebutuhan keuangan masa depan dan mengelola sumber daya dengan lebih efektif[3].

d) Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia (SDM) sangat penting dalam PKD. Pegawai yang memiliki kompetensi yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memastikan bahwa proses akuntansi berjalan dengan baik⁸.

e) Penggunaan Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi dalam PKD dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan. Teknologi ini membantu dalam pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Penerapan SAKD di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surabaya meliputi beberapa aspek penting, yaitu:

Gambaran Umum Penerapan SAKD di BAPENDA Kota Surabaya

- Laporan Keuangan: BAPENDA Kota Surabaya menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

- Basis Akuntansi: Penyusunan laporan keuangan menggunakan basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menggunakan basis kas.

Identifikasi Kebijakan, Prosedur, dan Teknologi yang Digunakan

- Kebijakan: Penerapan SAKD di BAPENDA Kota Surabaya diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menetapkan standar untuk penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

- Prosedur: Proses penyusunan laporan keuangan dilakukan secara bertahap dengan rekonsiliasi laporan keuangan setiap 3 bulan sekali oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Pemkot Surabaya. Rekonsiliasi meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

- Teknologi: Penelitian lain tidak secara spesifik menyebutkan teknologi yang digunakan dalam penerapan SAKD di BAPENDA Kota Surabaya, tetapi umumnya penerapan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penyusunan laporan keuangan⁹.

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan SAKD

Analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) di Kota Surabaya meliputi faktor internal dan eksternal. Berikut adalah analisisnya:

Faktor Internal

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi SDM yang memadai sangat penting dalam menyusun dan mengelola laporan keuangan yang akurat. Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif

⁷ Yati and Hanifa, "ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2018-2019."

⁸ Rahmah, "PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) BERBASIS AKRUAL DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL."

⁹ Cahaya Putra and Romli, "Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Good Government Governance terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung."

terhadap kualitas laporan keuangan¹⁰. Pengalaman kerja yang cukup dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan.

2. Infrastruktur

Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penyusunan laporan keuangan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan¹¹

3. Prosedur Kerja

Prosedur penyusunan laporan keuangan yang jelas dan sistematis sangat penting. Pemkot Surabaya telah melakukan rekonsiliasi laporan keuangan setiap 3 bulan sekali, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Faktor Eksternal

1. Peraturan

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Peraturan ini menetapkan standar akuntansi pemerintahan yang harus diikuti oleh pemerintah daerah. Pemkot Surabaya telah membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan ini, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

2. Pengawasan

Pengawasan internal dapat membantu meminimalisir kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Namun, tidak ada informasi spesifik tentang pengawasan internal di Pemkot Surabaya dalam sumber yang tersedia.

3. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan akuntansi yang jelas dan konsisten dapat meningkatkan efektivitas penerapan SAKD. Pemkot Surabaya telah memiliki kebijakan akuntansi yang jelas, seperti yang tercantum dalam Perwali Nomor 32 Tahun 2014.

Dengan demikian, efektivitas penerapan SAKD di Kota Surabaya dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti kompetensi SDM, infrastruktur teknologi informasi, dan prosedur kerja yang jelas sangat penting. Sementara itu, faktor eksternal seperti peraturan pemerintah dan kebijakan akuntansi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas penerapan SAKD.

Dampak Penerapan SAKD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) di Kota Surabaya memiliki dampak positif dan negatif yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surabaya. Berikut adalah analisisnya:

Dampak Positif

1. Kualitas Laporan Keuangan

Penerapan SAKD telah meningkatkan akurasi dan transparansi laporan keuangan. BAPENDA Kota Surabaya menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010¹².

Penggunaan basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, meningkatkan kualitas laporan keuangan.

2. Pengawasan dan Akuntabilitas

¹⁰ Imran, "Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau."

¹¹ Watopa, "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi."

¹² Mentu and Sondakh, "PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NO.71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN DINAS SOSIAL PROV. SULUT."

Proses rekonsiliasi laporan keuangan setiap 3 bulan sekali oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan BAPENDA Kota Surabaya meningkatkan akuntabilitas dan meminimalisir kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan¹³.

Meskipun tidak ada informasi spesifik tentang pengawasan internal di BAPENDA Kota Surabaya, penerapan SAKD secara umum meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah[1].

3. Kinerja Keuangan

Penerapan SAKD membantu meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah dengan lebih akurat dan transparan. BPKPD Kota Surabaya yang menangani 72 SKPD di Kota Surabaya memastikan bahwa pendapatan daerah diolah dengan efektif¹⁴.

Dampak Negatif

1. Biaya Implementasi

Penerapan teknologi informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi laporan keuangan dapat memerlukan biaya yang signifikan, yang mungkin menjadi beban bagi BAPENDA Kota Surabaya[2].

2. Ketergantungan pada SDM

Kualitas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh kompetensi SDM. Jika SDM tidak memiliki kompetensi yang memadai, maka kualitas laporan keuangan dapat menurun.

3. Keterlambatan dalam Implementasi

Proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara bertahap dapat memakan waktu dan memungkinkan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan yang akurat.

Dengan demikian, penerapan SAKD di BAPENDA Kota Surabaya memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas, tetapi juga memiliki beberapa tantangan seperti biaya implementasi dan ketergantungan pada kompetensi SDM.

KESIMPULAN

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surabaya telah meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah secara signifikan. Gambaran Umum Penerapan SAKD menunjukkan bahwa BAPENDA Kota Surabaya telah menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan, termasuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Kebijakan, Prosedur, dan Teknologi yang digunakan meliputi rekonsiliasi laporan keuangan setiap 3 bulan sekali oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan BAPENDA Kota Surabaya, serta penggunaan basis akrual dan kas dalam penyusunan laporan keuangan.

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan SAKD menunjukkan bahwa faktor internal seperti kompetensi SDM dan infrastruktur teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Faktor eksternal seperti peraturan pemerintah dan pengawasan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas penerapan SAKD[2][3]. Dampak Penerapan SAKD terhadap pengelolaan keuangan daerah meliputi dampak positif seperti peningkatan akurasi dan transparansi laporan keuangan, serta pengawasan yang lebih baik. Namun, dampak negatif seperti biaya implementasi teknologi dan ketergantungan pada kompetensi SDM juga perlu diatasi. Dengan demikian, penerapan SAKD di BAPENDA Kota Surabaya telah meningkatkan kinerja keuangan dan akuntabilitas, tetapi juga memerlukan perhatian lebih pada aspek teknologi dan kompetensi SDM.

DAFTAR PUSTAKA

¹³ Cahaya Putra and Romli, "Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Good Government Governance terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung."

¹⁴ Mentu and Sondakh, "PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NO.71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN DINAS SOSIAL PROV. SULUT."

- Cahaya Putra, Vicky Dzaky, and Romli Romli. "Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Good Government Governance terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung." *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi* 17, no. 1 (January 29, 2022): 46–65. <https://doi.org/10.54783/portofolio.v17i1.195>.
- Desipradani, Gita, and Zeni Rusmawati. "PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMKOT SURABAYA DALAM PENERAPAN PP NO. 71 TAHUN 2010," no. 2 (2017).
- Imran, Muhammad. "Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 11, no. 2 (January 9, 2023): 165–74. <https://doi.org/10.32639/jiak.v11i2.232>.
- Indrayani, Kartika Dwi, and Harjanti Widiastuti. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten)." *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 4, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.18196/rab.040148>.
- Mentu, E P, and J J Sondakh. "PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NO.71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN DINAS SOSIAL PROV. SULUT," 2016.
- Rahmah, Kurnia. "PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) BERBASIS AKRUAL DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL," n.d.
- Rampengan, A, J Morasa, and R Pusung. "ANALISIS LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BITUNG," 2021.
- Riharjo, Ikhsan Budi, and Lilis Ardini. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual Atas Barang Milik Pemerintah Daerah Kota Surabaya" 13 (2020).
- Watopa, Moses Aser. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi," n.d.
- Yati, Kartina, and Lia Hanifa. "ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2018-2019" 3 (2021).